

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi sorotan utama dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkembangan zaman dan semakin ketatnya persaingan global menuntut untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia menuju manusia yang unggul memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Saat ini, Indonesia memiliki harapan yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju dimana sumber daya manusia yang dimilikinya memiliki kualitas yang tinggi, terlebih lagi anugerah sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Indonesia.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal ini bisa dicermati dari data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Pada tahun yang sama, *Business World* memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada pada urutan 45 dari 63 negara. Peringkat Indonesia ini kalah dari dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia yang berada pada urutan 13 dan 22. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu strategi dan

fokus utama dalam pembangunan di Indonesia sehingga dapat menjawab tantangan Indonesia mengingat bahwa saat ini Indonesia berada dalam periode MEA (masyarakat ekonomi Asean). Dimana pada periode MEA ini sangat menuntut sumber daya manusia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga bisa mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan unggul.

Aparatur pemerintah merupakan salah satu bagian yang perlu dan penting untuk diperhatikan dalam proses pembangunan sumber daya manusia karena aparatur pemerintah yang menggerakkan roda pemerintahan di Indonesia. Salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Sumber daya aparatur Negara adalah untuk meningkatkan Profesionalisme, Netralitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di arahkan untuk membentuk Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Netral, dan Sejahtera, dengan hal tersebutlah yang mengidentifikasi sangat pentingnya profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.

Pentingnya Profesionalisme Aparatur juga berdasarkan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa: “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai Unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara Profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan Tugas Negara, Pemerintah dan Pembangunan.

Profesionalisme merujuk pada komitmen anggota-anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Istilah profesionalisme juga mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Begitu pula halnya dengan para pegawai pemerintah yang ada di Kecamatan, karena sejatinya merekalah ujung tombak dari pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kecamatan merupakan bagian Wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang di pimpin oleh Seorang Camat. Adapun lokus dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Conggeang yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang. Kecamatan conggeang ini juga memiliki Misi salah satunya yaitu meningkatkan Profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam hal ini kecamatan conggeang kabupaten sumedang sebagai instansi pemerintah memiliki tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Tak terkecuali di Kecamatan Conggeang, aparatur pemerintah di haruskan bersikap

profesional, agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Sehingga dengan sikap profesionalisme yang di emban oleh aparatur juga akan membuat program-program yang telah ditentukan sebelumnya akan tercapai. Dengan jumlah pegawai Negeri Sipil yang ada Di kecamatan conggeang berjumlah 17 orang, diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah. Adapun capaian kinerja pegawai kecamatan Conggeang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Pegawai Kecamatan Conggeang

No	Indikator	Target	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Indeks efektifitas proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan	100	100	86,28	100	100	96,9
2	meningkatnya indeks kepuasan dalam pelayanan public	100	100	74,52	100	100	83,94
3	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahhan desa serta pengelolaan dan pendayagunaan ADD berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran	100	95,83	88,29	100	92,1	50
4	terjalannya kerjasama muspika dalam penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100	100	100	2,2	100	100
5	meningkatnya pengetahuan dan tertib administrasi keuangan desa	100	97,25	69,24	100	86,13	
6	meningkatnya wawasan linmas dalam bidang keamanan lingkungan	100	100	100	100	93,71	94
7	meningkatnya kapasitas dan pelayanan kecamatan serta terfasilitasnya pembinaan PPK	100	100	100	100	97,01	100
8	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur pemerintah	100	98,25	100	100	97,96	96,43

9	meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparat pemerintah	100				87,08	
10	meningkatnya pengetahuan wawasan dan pengetahuan mengenai kelembagaan Desa	100				87,56	96,84
11	meningkatnya pemahaman tentang pancasila Bhineka tunggal ika UUD 1945 dan NKRI	100	50	65,75	80	80,25	100

Sumber: Renstra Kecamatan Conggeang

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan kinerja kebanyakan terjadi pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa profesionalisme merujuk pada komitmen anggota untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaannya. Sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 pasal 2 menyatakan bahwa mereka akan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. Penggunaan istilah profesionalitas berkaitan dengan sumpahnya, dimana yang dimaksud dalam hal ini adalah sumpah ASN. Apabila dilihat dari kinerja masih mengalami kenaikan dan penurunan.

Selain capaian kinerja masih ada beberapa Fenomena permasalahan yang ada di kecamatan Conggeang yaitu, sebagaimana yang di utaran oleh salah satu pegawai di kantor kecamatan Conggeang itu sendiri mengenai tidak efisiennya salah satu program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang merupakan program dari pemerintah dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten atau Kota mencakup

Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Program BPNT di Kecamatan, khususnya di Kecamatan Conggeang di jalankan Oleh bagian kasi sosial, namun program tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu pada PERMENSOS nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 1 nomor 1. Dimana beberapa masyarakat yang berhak menerima tidak menerima bantuan tersebut dan malah sebaliknya. Tidak tepatnya sasaran program ini dikarenakan adanya data yang tidak diperbaharui.

Permasalahann lainnya yaitu masih adanya beberapa pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir dan kembali ke kantor pada jam pulang, hanya untuk melakukan absen *fingerprint*. Hal tersebut mencerminkan sikap tanggungjawab dari aparatur itu sendiri.

Selain itu terdapat pula fenomena lain yang di temukan yaitu mengenai keprofesionalan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan adanya sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya hanya lulusan SLTP dan SLTA. Menurut Nasution (2003, seperti dikutip dalam Gering, Godensia, 2017) mengatakan bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan yang pernah di ikuti oleh seseorang sangat mempengaruhi kemampuan yang di kuasai. Hal lainnya terlihat dalam pelaksanaan pekerjaannya, dimana antara pendidikan dengan bidang pekerjaan yang di emban masih ada ketidaksesuaian. Padahal profesionalisme itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing, juga

menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas di bidang pemerintahan yang merupakan syarat demi terbentuknya aparatur yang profesional. Profesionalisme atau tidaknya seorang aparatur dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya, kemampuan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (efektivitas), ketepatan cara dan waktu (efisiensi) dalam menjalankan tugas, serta memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas yang dimilikinya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Profesionalisme Aparatur Dalam Pelaksanaan Pemerintah Di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang di kemukakan di atas Penulis memfokuskan Permasalahan yaitu:

1. Profesionalisme Aparatur dalam pelaksanaan pemerintah di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
2. Capaian Kinerja yang belum signifikan dari tahun ke tahun
3. Masih ada Aparatur pemerintah yang kurang memiliki tingkat disiplin yang tinggi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus Masalah Di atas Rumusan masalah dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Aparatur dalam Pelaksanaan Pemerintah di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pemerintah di kecamatan conggeang Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyebab Profesionalisme aparatur dalam Pelaksanaan pemerintah di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di uraikan di atas, Maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Profesionalisme Aparatur dalam Pelaksanaan pemerintah di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pemerintah di kecamatan conggeang Kabupaten Sumedang?

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebab rendahnya profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pemerintah di kecamatan conggeang Kabupaten Sumedang?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian Ini mempunyai beberapa Kegunaan yaitu di antaranya:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian Ilmu Administrasi Publik Khususnya dalam pengembangan kajian Birokrasi dan Pelayanan Publik. Serta dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai Bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan alat untuk penyelesaian masalah apabila terjadi masalah dalam organisasi tentunya apabila berhubungan dengan Profesionalisme Aparat dalam melaksanakan roda pemerintahan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam memecahkan suatu masalah yang sudah di sebutkan di atas, peneliti memerlukan adanya landasan teori yang bisa dijadikan acuan berfikir. berkaitan dengan judul yang peneliti ajukan, maka peneliti mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat para ahli yang kebenarannya tidak bisa di ragukan lagi.

adapun pendapat administrasi publik menurut Menurut Basuki (2018: 11) ilmu administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisien terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. sebelumnya. sedangkan Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (2016:107) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang di perintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Di samping menggunakan teori ilmu administrasi sebagai *grand theory*, peneliti juga menggunakan teori sumber daya manusia sebagai *middle theory* yang tentunya berkaitan dengan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pemerintahan dalam penelitian ini. adapun Sumber Daya Menurut Mangkunegara (2011) menyatakan bahwa Sumber daya manusia perlu di kelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. keseimbangang tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. dengan peraturan manajemn sumber daya manusia secara profesional, diharapkan karyawan dapat bekerja secara produktif.

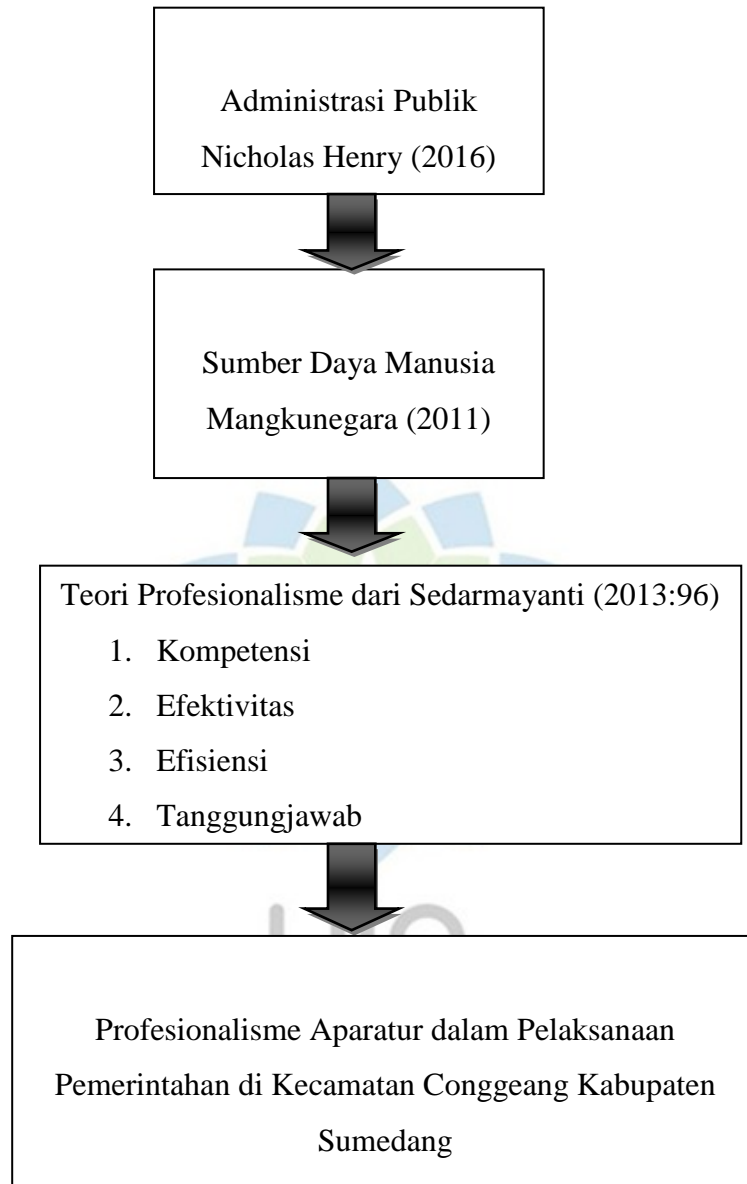
pengelolaan karyawan secara profesional ini harus di mulai sejak perekrutan, penyeleksian, dan penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan dan pengembangan kariernya.

Menurut (Kadarisman 2018: 54) Profesionalisme yaitu suatu kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme juga menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas di bidang pemerintahan yang merupakan syarat terbentuknya aparatur yang Profesional, untuk menjadi seseorang yang yang Profesional dalam memberikan pelayanan, Aparatur Negara harus memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tugas masing-masing. (Kadarisman, 2018)

Sedarmayanti (2013: 96) Menyatakan Bahwa Profesionalisme adalah pilar yang menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja dengan baik. Adapaun ukuran dari Profesionalisme adalah:

1. Kompetensi
2. Efektivitas
3. Efisiensi
4. Tanggungjawab

Berdasarkan uraian di atas maka Kerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan Sebagai Berikut:



Gambar 1.1
Sketsa Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan Kerangka Pemikiran tersebut maka Profesionalisme Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang akan berjalan efektif dan efisien, apabila dalam pelaksanaan Profesionalistasnya memenuhi Kompetensi, Efektivitas, Efisiensi dan Tanggungjawab.

